PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
Jl. Brantas Kelurahan Werungotok Nganjuk 64419 Jawa Timur
Telp & Fax. (0358) 321400
email : bpkad@nganjukkab.go.id

Nganjuk, 21 Maret 2025

Kepada

Yth. Kepala BAPPEDA
Kab. Nganjuk
di
N G A N J U K

SURAT PENGANTAR
Nomor : 000.7.5/ 503 /411.402/2025

NO	URAIAN	BANYAKNYA	KETERANGAN
1.	Menyampaikan Dokumen Laporan Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Triwulan I Tahun 2025 untuk memenuhi Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor : 000.7.5/464/411.000/2025 tanggal 4 Maret 2025	1 (satu) set	Dikirimkan dengan hormat untuk menjadikan periksa

Plt. Kepala BPKAD
Kabupaten Nganjuk

Dra. DYAH PUSPITA RINI, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19680511 199202 2 001

LAPORAN PENGENDALIAN DAN EVALUASI PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH TRIWULAN I



BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN NGANJUK
TAHUN 2025

BAB I
PENDAHULUAN

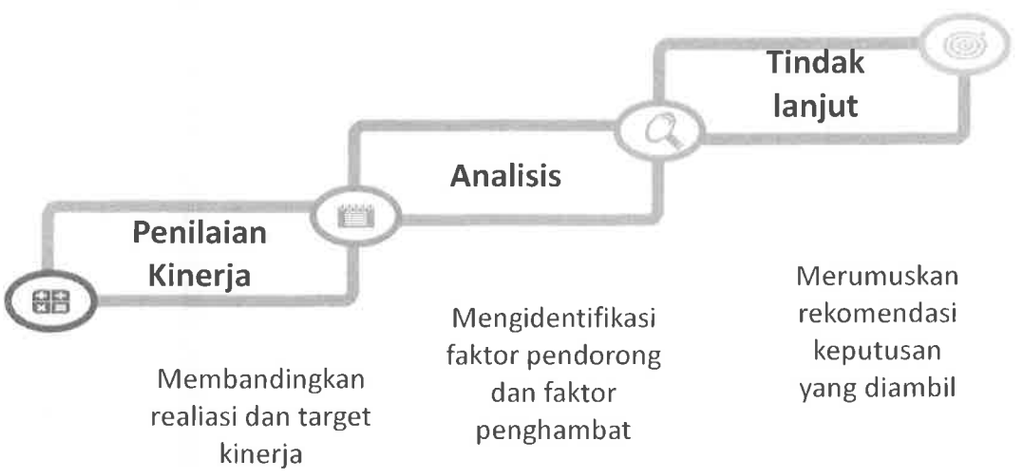
I.1. Latar Belakang

Pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah merupakan suatu proses pemantauan dan supervisi dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pembangunan daerah, serta menilai realisasi kinerja dan keuangan untuk memastikan tercapainya target secara ekonomis, efisien, dan efektif.

Untuk mengetahui pencapaian target kinerja pelaksanaan urusan pemerintahan daerah, perlu dilakukan evaluasi Renja Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2025 melalui pemantauan dan supervisi pelaksanaan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah pada APBD Tahun Anggaran 2025 guna menjamin rencana yang telah ditetapkan dapat mencapai target kinerja tujuan dan sasaran Perangkat Daerah.

Evaluasi Renja Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2025 diharapkan diperoleh data dan informasi penilaian target kinerja tujuan dan sasaran Perangkat Daerah, serta Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah. Dari penilaian kinerja tersebut dapat diidentifikasi faktor pendorong dan penghambat pencapaian target kinerja, serta merumuskan tindak lanjut kebijakan yang akan diambil guna mengoptimalkan pencapaian target kinerja, dengan kerangka evaluasi sebagai berikut:

Gambar 1. Kerangka Evaluasi Renja Perangkat Daerah



Sumber: Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, diolah.

Dengan demikian hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2025 dapat memberikan gambaran efektifitas penetapan rencana, relevansi, dampak serta keberlanjutan program pembangunan daerah terhadap permasalahan dan isu penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, serta masukan perbaikan kebijakan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah di masa yang akan datang melalui umpan balik dan *lesson-learned* peningkatan akuntabilitas kinerja.

I.2. Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
2. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015.
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
4. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 11 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.
5. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2024-2026.
6. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 15 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2025.
7. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 39 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

I.3. Maksud dan Tujuan

Maksud dilaksanakan evaluasi Renja Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2025 adalah menilai capaian target kinerja target kinerja tujuan dan sasaran Perangkat Daerah, serta Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2025.

Tujuan dilaksanakan evaluasi Renja Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2025 adalah:

1. Mengidentifikasi faktor faktor pendorong dan penghambat pencapaian target kinerja.
2. Merumuskan tindak lanjut kebijakan yang akan diambil guna mengoptimalkan pencapaian target kinerja.

I.4. Sistematika Penulisan

Evaluasi Renja Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2025 disajikan dalam sistematika sebagai berikut:

1. BAB I PENDAHULUAN, menguraikan latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, sistematika penulisan, dan metode evaluasi Renja Perangkat Daerah.
2. BAB II CAPAIAN KINERJA RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025, menjelaskan capaian Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah, serta capaian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah.
3. BAB III FAKTOR PENDORONG DAN FAKTOR PENGHAMBAT PENCAPAIAN KINERJA, menjelaskan faktor pendorong dan faktor penghambat pencapaian Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah, serta faktor pendorong dan faktor penghambat pencapaian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah
4. BAB IV PENUTUP, menguraikan kesimpulan dan tindak lanjut.

I.5. Metode Evaluasi Renja Perangkat Daerah

Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 menggunakan metode evaluasi pengukuran kinerja dengan pendekatan *gap analysis*, metode ini dilakukan dengan membandingkan antara realisasi kinerja (apa yang sudah dicapai) dengan target kinerja (apa yang harus dicapai), perbandingan tersebut merupakan rasio capaian target kinerja yang dinyatakan dalam % (persentase). Dari keseluruhan capaian target kinerja dilakukan penilaian rata-rata capaian kinerja dan predikat kinerja dengan menggunakan kriteria sebagai berikut:

Tabel 1. Skala Nilai Peringkat Kinerja

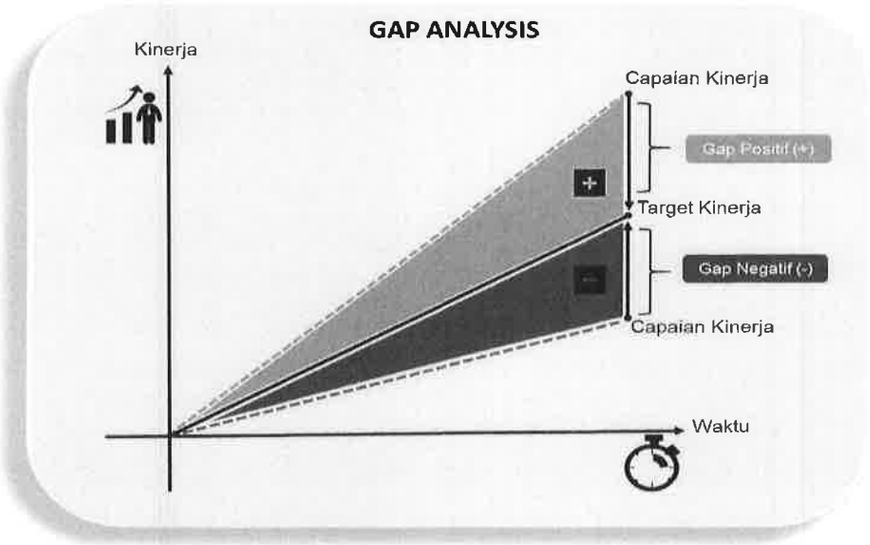
No.	Interval Nilai Capaian Kinerja	Kriteria Penilaian Capaian Kinerja
1.	≥ 91%	Sangat Tinggi
2.	76% ≤ 90%	Tinggi
3.	66% ≤ 75%	Sedang
4.	51% ≤ 65%	Rendah
5.	≤ 50%	Sangat Rendah

Dalam penilaian kinerja tersebut, gradasi nilai (skala intensitas) kinerja suatu indikator dapat dimaknai sebagai berikut:

1. Hasil Sangat Tinggi dan Tinggi, gradasi ini menunjukkan pencapaian/realisasi kinerja capaian telah memenuhi target dan berada diatas persyaratan minimal penilaian kinerja.
2. Hasil sedang, gradasi cukup menunjukkan pencapaian/realisasi kinerja capaian telah memenuhi persyaratan minimal.
3. Hasil rendah dan sangat rendah, gradasi ini menunjukkan pencapaian/realisasi kinerja belum memenuhi/masih dibawah persyaratan minimal pencapaian kinerja yang diharapkan.

Pendekatan *gap analiysis* dalam evaluasi pengukuran kinerja ini membandingkan antara capaian kinerja dengan target kinerja. *Gap* dapat terjadi apabila capaian kinerja berbeda dengan target kinerja, atau hasil yang dicapai selama pelaksanaan berbeda dengan hasil yang diharapkan dalam perencanaan, sebagaimana tergambar berikut:

Gambar 2. *Gap Analysis* Antara Capaian Kinerja Dengan Target Kinerja



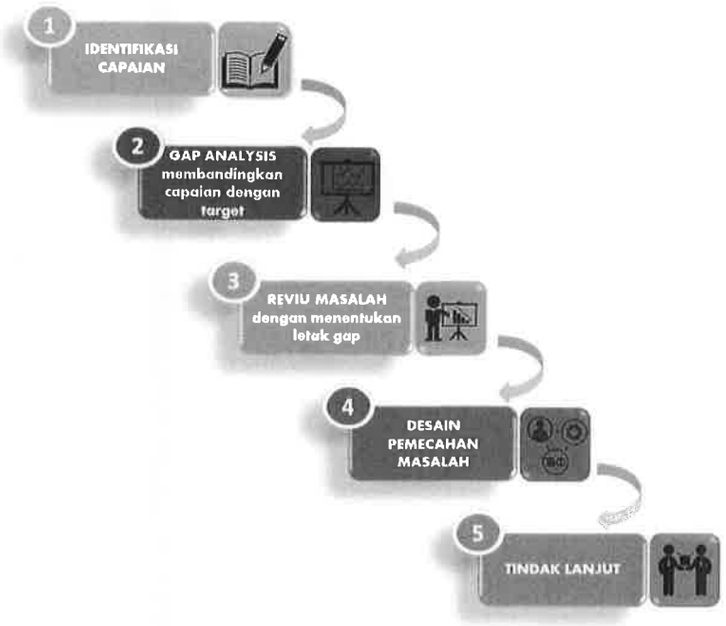
Gap antara capaian kinerja dengan target kinerja dapat bernilai positif (+) maupun negatif (-). *Gap* bernilai positif (+) jika capaian kinerja lebih besar dari target kinerja, sebaliknya *gap* akan bernilai negatif (-) jika capaian kinerja lebih kecil dari target kinerja.

Pendekatan *gap* analysis atau analisis kesenjangan bermanfaat untuk:

1. Menilai tingkat kesenjangan antara capaian kinerja dengan target yang ditetapkan.
2. Mengetahui tingkat peningkatan kinerja yang diperlukan untuk menutup kesenjangan tersebut.
3. Menjadi salah satu dasar pengambilan keputusan terkait prioritas waktu dan biaya yang dibutuhkan

Langkah-langkah yang dilakukan dalam *gap analysis*:

1. Identifikasi kondisi aktual dan capaian kinerja.
2. Melakukan analisis kesenjangan dengan membandingkan capaian kinerja dengan target kinerja.
3. Reviu permasalahan faktor pendorong dan faktor penghambat dengan menggunakan statistik deskriptif, yaitu dengan melakukan analisis permasalahan berdasarkan besar atau kecilnya *gap*.
4. Menyusun desain pemecahan masalah apabila *gap* bernilai negatif
5. Menentukan tindak lanjut yang diperlukan.



Dalam rangka memberikan informasi yang kredibel dan bermanfaat maka evaluasi Renja Perangkat Daerah harus didukung oleh data dan informasi yang akurat dan *up to date*. Mekanisme pengumpulan data menggunakan penelaahan dokumen, data survei yang dilakukan secara mandiri oleh Perangkat Daerah maupun lembaga lain yang berkompeten, seperti BPS, lembaga riset dan sebagainya.

BAB II
CAPAIAN KINERJA RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025

II.1. Capaian Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

Capaian kinerja Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah Tahun 2025 disajikan sebagaimana tabel berikut:

No.	Tujuan/Sasaran	Indikator	Kinerja Tahun 2025		
			Target	Realisasi	Capaian
1	Meningkatkan tata kelola keuangan daerah	Opini atas audit BPK	WTP	50 %	50 %
2	Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah	Persentase OPD yang menerapkan pengelolaan keuangan dan aset daerah sesuai standar	100 %	100%	100%

Analisis capaian kinerja Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah Tahun 2025 diuraikan sebagai berikut:

1. Capaian indikator kinerja sebesar 50% atas tujuan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Nganjuk dikarenakan proses audit BPK masih berjalan. Capaian tersebut diperoleh dari tahapan pemeriksaan yang telah diselesaikan yaitu pemenuhan dokumen yang diminta oleh BPK ;
2. Dalam pelaksanaan program peningkatan kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah dengan indikator persentase OPD yang menerapkan pengelolaan keuangan dan aset daerah sesuai standart baru mencapai 8,22% pada tribulan I hal ini dikarenakan sebagaian besar subkegiatan baru mulai dilaksanakan pada tribulan II.

II.2. Capaian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah

Capaian kinerja Program (outcome) serta Kegiatan dan Sub Kegiatan (output) disajikan sebagaimana tabel berikut:

No.	Program/Kegiatan	Indikator	Kinerja Tahun 2024		
			Target	Realisasi	Capaian
A	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**		**82**	**27%**	**32%**
1	***Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah***		**100%**	**31,25%**	**20,71%**
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	5	1	20%
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen RKA-SKPD	1	0	0%
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan dokumen perubahan RKA-SKPD	1	0	0%
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi penyusunan dokumen DPA-SKPD	1	0	0%
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah dokumen perubahan DPA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen perubahan DPA-SKPD	1	0	0%
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	4	1	25%
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	3	3	100%
2	***Administrasi Keuangan Perangkat Daerah***		**100%**	**68,75%**	**69,44%**
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	46	39	85%
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD dan laporan koordinasi penyusunan laporan keuangan akkhir tahun SKPD	1	1	100%
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD dan laporan koordinasi penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD	17	4	24%
3	***Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah***		**100%**	**50,00%**	**50,00%**
	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah laporan penatausahaan barang milik daerah pada SKPD	2	1	50%
4	***Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah***		**75%**	**0,00%**	**0,00%**

No.	Program/Kegiatan	Indikator	Kinerja Tahun 2024		
			Target	Realisasi	Capaian
	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	60	0	0%
	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah orang yang mengikuti sosialisasi peraturan perundang-undangan	150	0	0%
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah orang yang mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	150	0	0%
5	***Administrasi Umum Perangkat Daerah***		**90%**	**26,48%**	**60,35%**
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang di sediakan	1	1	100%
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah peralatan rumah tangga yang disediakan	1	1	100%
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang di sediakan	1	1	100%
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang di sediakan	1	1	100%
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah dokumen bahan bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang disediakan	3	0	0%
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	10	3	30%
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	36	10	28%
	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah dokumen penatausahaan arsip dinamis pada SKPD	200	50	25%
6	***Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah***		**80%**	**0,00%**	**0,00%**
	Pengadaan Mebel	Jumlah unit mebel yang di sediakan	10	0	0%
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit peraltan dan mesin lainnya yang di sediakan	10	0	0%
7	***Penyediaan jasa penunjang urusan Pemerintahan Daerah***		**90%**	**27,45%**	**38,89%**
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	3	2	67%
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang di sediakan	36	9	25%
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang di sediakan	12	3	25%
8	***Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah***		**84%**	**13,13%**	**12,83%**

No.	Program/Kegiatan	Indikator	Kinerja Tahun 2024		
			Target	Realisasi	Capaian
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang di pelihara dan di bayarkan pajak dan perizinan	19	5	26%
	Pemeliharaan Mebel	Jumlah mebeleur yang dipelihara	10	0	0%
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin yang di pelihara	10	0	0%
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang di pelihara/direhabilitasi	1	0,25	25%
B	**PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH**		**100%**	**8%**	**15%**
1	***Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah***		**96%**	**0,91%**	**20,00%**
	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah dokumen KUA PPAS yang disusun	2	0	0%
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah dokumen perubahan KUA dan perubahan PPAS yang disusun	2	0	0%
	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah perda APBD dan Perbup penjabaran APBD yang disusun	2	2	100%
	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah perda perubahan APBD dan Perbup perubahan penjabaran APBD yang disusun	5	0	0%
	Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Pembinaan Penganggaran Daerah yang dilaksanakan	208	0	0%
2	***Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah***		**100%**	**10,59%**	**43,81%**
	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Jumlah dokumen hasil koordinasi dan pengelolaan Kas Daerah	9000	797	9%
	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Jumlah dokumen hasil pengendalian dan penerbitan anggaran kas dan SPD	208	100	48%
	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Jumlah dokumen hasil koordinasi fasilitasi, asistensi, singkronisasi, supervisi, monitoring dan evaluasi pengelolaan dana perimbangan dan adana transfer lainnya	92	24	26%
	Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	Jumlah dokumen hasil koordinasi, pelaksanaan kerjasama dan pemantauan transaksi non tunai dengan lembaga keunagan bank dan lembaga keuangan bukan bank	1	1	100%

No.	Program/Kegiatan	Indikator	Kinerja Tahun 2024		
			Target	Realisasi	Capaian
	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	Jumlah dokumen hasil rekonsiliasi data penerimaan dan pengeluaran kas serta pemungutan dan pemotongan atas SP2D dengan instansi terkait	650	129	20%
	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	Jumlah petunjuk teknis administrasi keuangan yang berkaitan dengan penerimaan dan pengeluaran kas serta penatausahaan dan pertanggungjawaban sub kegiatan	5	3	60%
3	***Koordinasi dan pelaksanaan akuntansi dan pelaporan keuangan daerah***		**100%**	**29,59%**	**11,53%**
	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	Jumlah dokumen hasil rekonsiliasi dan verifikasi aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan, belanja, pembiayaan, pendapatan LO, dan beban	11	0	0%
	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Jumlah laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan semesteran	4	1	25%
	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Jumlah rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kabupaten/Kota dan Rancangan peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	2	0	0%
	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	Jumlah dokumen hasil koordinasi, singkronisasi, dan penyelesaian tuntutan perbendaharaan dan tuntutan kerugian daerah	2	0	0%
	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah orang yang mengikuti pembinaan akuntansi, pelaporan dan pertanggungjawaban pemerintah Kabupaten/Kota	150	49	33%
4	***Penunjang urusan kewenangan pengelolaan keuangan daerah***		**80%**	**0,00%**	**0,00%**
	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Jumlah laporan hasil analisis perencanaan dan penyaluran bantuan keuangan	6	0	0%
	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Jumlah laporan hasil pengelolaan dana darurat dan mendesak	4	0	0%

No.	Program/Kegiatan	Indikator	Kinerja Tahun 2024		
			Target	Realisasi	Capaian
	Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota	Jumlah laporan hasil pengelolaan dana bagi hasil kabupaten/Kota	2	0	0%
5	***Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah lingkup Keuangan Daerah***		**80%**	**0,00%**	**0,00%**
	Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah orang yang mengikuti pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/kota	100	0	0%
C	**PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH**		**100%**	**57,99%**	**37,50%**
1	***Pengelolaan Barang Milik Daerah***		**100%**	**57,99%**	**37,50%**
	Penyusunan Standar Harga	Jumlah Standar Harga yang Disusun	52	52	100%
	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah rencana kebutuhan BMD	52	0	0%
	Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Kebijakan Pengelolaan BMD	1	0	0%
	Penatausahaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan BMD	52	52	100%
	Inventarisasi Barang Milik Daerah	Jumlah laporan hasil inventarisasi (LHI) BMD	52	52	100%
	Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan BMD	4	0	0%
	Penilaian Barang Milik Daerah	Jumlah laporan hasil penilaian Barang Milik Daerah dan hasil koordinasi penilaian Barang Milik Daerah	30	0	0%
	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Jumlah dokumen hasil optimalisasi penggunaan, pemanfaatan, pemindahtanganan, pemusnahan dan penghapusan BMD barang milik daerah	26	0	0%

Analisis realisasi output Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2025

1. Capaian Output Kegiatan pada Program Penunjang Kegiatan Pemerintahan Daerah Tribulan I rata-rata 27,13%, sehinga berdasarkan skala nilai peringkat kinerja Permendagri No. 86 Tahun 2017 kriteria penilaian capaian kinerja adalah Sangat Rendah hal ini disebabkan sebagian besar subkegiatan mulai dilaksanakan pada tribulan II;
2. Capaian Output Sub Kegiatan pada Program Pengelolaan Keuangan Daerah Tribulan I rata-rata 8,22%, sehinga berdasarkan skala nilai peringkat kinerja Permendagri No. 86 Tahun 2017 kriteria penilaian capaian kinerja adalah Sangat Rendah hal ini disebabkan sebagian besar subkegiatan mulai dilaksanakan pada tribulan II;
3. Capaian output Sub Kegiatan Pengelolaan Barang Milik Daerah Tribulan I rata-rata 13,13%, sehinga berdasarkan skala nilai peringkat kinerja Permendagri No. 86 Tahun 2017 kriteria penilaian capaian kinerja adalah Sangat Rendah hal ini disebabkan sebagian besar subkegiatan mulai dilaksanakan pada tribulan II.

BAB III
FAKTOR PENDORONG DAN FAKTOR PENGHAMBAT PENCAPAIAN KINERJA

III.1. Faktor Pendorong Dan Faktor Penghambat Pencapaian Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

Analisis Faktor Pendorong Dan Faktor Penghambat Pencapaian Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah disajikan dalam tabel berikut:

No.	Tujuan/Sasaran Perangkat Daerah	Faktor Pendorong	Faktor Penghambat
1.	Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang berkualitas	Sinergitas seluruh stakeholder	-
2.	Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah	Sinergitas seluruh stakeholder	-

III.2. Faktor Pendorong Dan Faktor Penghambat Pencapaian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah

Analisis Faktor Pendorong Dan Faktor Penghambat Pencapaian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah disajikan dalam tabel berikut:

No.	**Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah**	**Faktor Pendorong**	**Faktor Penghambat**
1.	Program Pengelolaan Keuangan Daerah, Kegiatan Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah, Sub Kegiatan Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah Sub Kegiatan Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Adanya ketentuan yang menjadi acuan dalam memberikan pelayanan SP2D dan lainnya kepada OPD sehingga pelayanan tepat waktu	OPD belum melengkapi permohononan sesuai ketentuan sehingga pelayanan SP2D dan lainnya tidak dapat segera ditindaklanjuti

No.	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah	Faktor Pendorong	Faktor Penghambat
	Sub Kegiatan Rekonsiliasi data penerimaan dan Pengeluaran kas serta pemungutan dan pemotongan atas SP2D dengan instansi terkait		

BAB IV
PENUTUP

IV.1. Kesimpulan

Laporan Tribulan I Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2025 ini memuat hasil evaluasi kegiatan Bulan Januari s.d. Maret Tahun 2025. Kebijakan Program maupun kegiatan yang dan dilaksanakan tersebut berpedoman dan bertujuan untuk wujudkan visi dan misi BPKAD Kabupaten Nganjuk. Program dan Kegiatan tersebut mengacu kepada Rencana Pemerintah Daerah (RPD) BPKAD Kab. Nganjuk Tahun 2024 – 2026. Dalam realisasinya terdapat faktor pendorong dan penghambat. Untuk faktor pendorong akan dipertahankan sebagai dalam proses pencapaian kinerja tribulan berikutnya sedangkan faktor yang menghambat akan menjadi bahan evaluasi sehingga dapat direduksi pada tribulan berikutnya.

IV.2. Tindak Lanjut

Untuk lebih mengoptimalkan evaluasi strategi, kebijakan, program dan kegiatan yang dilakukan maka tindak lanjut yang akan dilakukan adalah:

a. Menghimbau OPD untuk melakukan penelitian dokumen secara mandiri sebelum mengajukan permohonan SP2D dan dokumen lainnya;
b. Menjadikan hasil evaluasi kinerja tribulan berikutnya;
c. Tetap melaksanakan sesuai dengan aturan yang berlaku;

Nganjuk, 20 Maret 2025
Plt. Kepala BPKAD
Kabupaten Nganjuk



Dra. Dyah Puspita Rini, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19680511 199202 2 001

EVALUASI TERHADAP HASIL RENJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN NGANJUK
RENJA PERANGKAT DAERAH BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
TRIWULAN I TAHUN 2025

Indikator dan target kinerja Perangkat Daerah kabupaten/kota yang mengacu pada sasaran RKPD

1 Indikator Kinerja : 1)Opini atas audit BPK 2)Persentase OPD yang menerapkan pengelolaan keuangan daerah sesuai standart 3)Persentase OPD yang menerapkan pengelolaan Barang Milik Daerah sesuai standart

2 Target Kinerja : 1)WTP 2)100% 3)100%

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ SubKegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan (output)	Target RPD pada Tahun 2024-2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)			Realisasi Capaian Kinerja RPD Kabupaten/kota sampai dengan RKPD Kabupaten/Kota Tahun lalu (2024)			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota Tahun Berjalan yang dievaluasi (2025)			Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Yang Dievaluasi (2025)			Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMDs/d tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)			Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
													I			II			III			IV									
1	2	3	4	5	6			7			8			9			10			11			12			13			14=7+13			15=14/6		16
					K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K	Rp	
1	Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah		Keuangan				1.649.954.289.000			435.265.521.146			459.288.873,679			60.862.248.190									-		60.862.248.190							Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
		5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP BPKAD	84	Nilai	26.618.424.000	80	Nilai	6.446.827.792	83		7.951.075.276	27,13%		792.251.845									27,13	%	792.251.845	107,13	%	7.239.079.637	127,54	27,20	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
		5.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100	%	163.726.000	85	%	35.651.157	100	%	54.567.000	31,25%	%	11.289.000									31,25	%	11.289.000	116,25	%	46.940.157	116,25	28,67	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
		5.02.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	15	Dokumen	24.559.000	5	Dokumen	8.476.357	5	dokumen	8.185.000	1	dokumen	3.682.000									1	dokumen	3.682.000	6	dokumen	12.158.357	40,00	49,51	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
		5.02.01.2.01.0002	Koordinasi dan penyusunan dokumen RKA SKPD	Jumlah dokumen RKA SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen RKA SKPD	3	Dokumen	22.921.000	5	Dokumen	3.772.000	1	dokumen	7.639.000	-	dokumen	-									-	dokumen	-	5	dokumen	3.772.000	166,67	16,46	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
		5.02.01.2.01.0003	Koordinasi dan penyusunan dokumen Perubahan RKA SKPD	Jumlah dokumen Perubahan RKA SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen Perubahan RKA SKPD	3	Dokumen	22.921.000	1	Dokumen	4.066.800	1	dokumen	7.639.000	-	dokumen	-									-	dokumen	-	1	dokumen	4.066.800	33,33	17,74	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
		5.02.01.2.01.0004	Koordinasi dan penyusunan DPA SKPD	Jumlah dokumen DPA SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen DPA-SKPD	3	Dokumen	16.373.000	1	Dokumen	1.365.000	1	dokumen	5.457.000	-	dokumen	3.735.000									-	dokumen	3.735.000	1	dokumen	5.100.000	33,33	31,15	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
		5.02.01.2.01.0005	Koordinasi dan penyusunan Perubahan DPA SKPD	Jumlah dokumen Perubahan DPA- SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen Perubahan DPA-SKPD	3	Dokumen	16.373.000	1	Dokumen	3.554.000	1	dokumen	5.457.000	-	dokumen	-									-	dokumen	-	1	dokumen	3.554.000	33,33	21,71	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
		5.02.01.2.01.0006	Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	12	Laporan	27.833.000	4	Laporan	6.613.500	4	laporan	9.276.000	1	laporan	3.872.000									1	laporan	3.872.000	5	laporan	10.485.500	41,67	37,67	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
		5.02.01.2.01.0007	Evaluasi kinerja perangkat daerah	Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	16	Laporan	32.746.000	3	Laporan	7.803.500	3	laporan	10.914.000	3	laporan	-									3	laporan	-	6	laporan	7.803.500	37,50	23,83	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
		5.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat daerah	Persentase dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun	100	%	20.611.903.000	80	%	5.203.195.203	100	%	5.537.703.833	64,75%	%	585.446.205									68,75	%	585.446.205	149	%	5.788.641.408	148,75	28,08	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
		5.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	46	ASN	20.565.973.000	138	ASN	5.193.414.203	46	orang/ bulan	5.524.062.833	39	orang/ bulan	579.345.205									39	orang/ bulan	579.345.205	177	orang/ bulan	5.772.759.408	384,78	28,07	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
		5.02.01.2.02.0005	Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	3	Laporan	22.921.000	0	Laporan	6.878.000	1	laporan	7.639.000	1	laporan	6.101.000									1	laporan	6.101.000	1	laporan	12.979.000	33,33	56,62	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
		5.02.01.2.02.0007	Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD dan laporan koordinasi penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD	51	Laporan	23.009.000	12	Laporan	2.903.000	17	laporan	8.002.000	4	laporan	-									4	laporan	-	16	laporan	2.903.000	31,37	12,62	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
		5.02.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase dokumen administrasi Barang Milik Daerah pada perangkat daerah	100	%	22.921.000	100	%	-	100	%	10.831.000	50,00%	%	0									50,00	%	-	150	%	-	150,00	0,00	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ SubKegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan (output)	Target RPD pada Tahun 2024-2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)			Realisasi Capaian Kinerja RPD Kabupaten/kota sampai dengan RKPD Kabupaten/Kota Tahun lalu (2024)			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota Tahun Berjalan yang dievaluasi (2025)			Realisasi Kinerja Pada Triwulan										Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Yang Dievaluasi (2025)			Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMDs/d tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)			Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
													I		II		III		IV												
1	2	3	4	5	6			7			8			9		10		11		12		13			14=7+13			15=14/6		16
					K		Rp	K		Rp	K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K		Rp	K		Rp	K	Rp	
		5.02.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	6	Laporan	22.921.000	2	Laporan	-	2	laporan	10.831.000	1	laporan	-							1	laporan	-	3	laporan	-	50,00	0,00	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
		5.02.01.2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persentase administrasi kepegawaian perangkat daerah**	**100**	**%**	**547.663.000**	**80**	**%**	**168.264.000**	**75**	**%**	**448.515.200**	**0,00%**	**%**	**3.960.000**							-	**%**	**3.960.000**	**80**	**%**	**172.224.000**	**80,00**	**31,45**	**Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah**
		5.02.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	60	Paket	27.000.000	0	Paket	-	60	paket	33.300.000	-	paket	-							-	paket	-	-	paket	-			Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
		5.02.01.2.05.0010	Sosialisasi peraturan perundang-undangan	Jumlah orang yang mengikuti sosialisasi peraturan perundang-undangan	450	Orang	228.895.000	54	Orang	8.250.000	150	orang	68.932.950	-	orang	3.960.000							-	orang	3.960.000	54	orang	7.210.000	12,00	3,15	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
		5.02.01.2.05.0011	Bimbingan teknis implementasi peraturan Perundang-undangan	Jumlah orang yang mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	450	Orang	291.768.000	104	Orang	165.014.000	150	orang	346.282.250	-	orang	-							-	orang	-	104	orang	165.014.000	23,11	56,56	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
		5.02.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase fasilitasi dan koordinasi bagian umum yang dilaksanakan perangkat daerah**	**100**	**%**	**1.116.548.000**	**25**	**%**	**164.752.696**	**90**	**%**	**401.317.922**	**26,48%**	**%**	**12.324.444**							**26,48**	**%**	**12.324.444**	**52**	**%**	**177.077.140**	**52,48**	**15,86**	**Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah**
		5.02.01.2.06.0001	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	3	Paket	19.647.000	2	Paket	2.170.835	1	paket	10.218.892	1	paket	-							1	paket	-	3	paket	2.170.835	100,00	11,05	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
		5.02.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah tangga	Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	3	Paket	16.373.000	1	Paket	1.054.870	1	paket	3.872.400	1	paket	-							1	paket	-	2	paket	1.054.870	66,67	6,44	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
		5.02.01.2.06.0004	Penyediaan bahan logistik	Jumlah paket bahan logistik yang disediakan	3	Paket	278.607.000	1	Paket	38.923.145	1	paket	121.095.440	1	paket	5.958.404							1	paket	5.958.404	2	paket	44.881.549	66,67	16,11	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
		5.02.01.2.06.0005	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	3	Paket	98.238.000	1	Paket	3.024.800	1	paket	32.742.000	1	paket	278.052							1	paket	278.052	2	paket	3.302.852	66,67	3,36	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
		5.02.01.2.06.0006	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	9	Dokumen	16.208.000	2	Dokumen	-	3	dokumen	5.400.000	-	dokumen	-							-	dokumen	-	2	dokumen	-	22,22	0,00	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
		5.02.01.2.06.0008	Fasilitasi kunjungan tamu	Jumlah laporan Fasilitasi kunjungan tamu	30	Laporan	48.119.000	7	Laporan	3.090.415	10	laporan	14.354.240	3	laporan	344.988							3	laporan	344.988	10	laporan	3.435.403	33,33	6,99	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
		5.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah laporan Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	108	Laporan	563.860.000	25	Laporan	105.624.631	36	laporan	187.264.000	10	laporan	5.743.000							10	laporan	5.743.000	35	laporan	111.367.631	32,41	19,75	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
		5.02.01.2.06.0010	Penatausahaan arsip dinamis pada SKPD	Jumlah dokumen penatausahaan arsip dinamis SKPD	600	Dokumen	49.119.000	150	Dokumen	8.864.000	200	dokumen	26.370.950	50	dokumen	-							50	dokumen	-	200	dokumen	8.864.000	33,33	18,05	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
		5.02.01.2.06.0011	Dukungan pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah dokumen dukungan pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	6	Dokumen	25.377.000	0	Dokumen	2.000.000													-			-		2.000.000	0,00	7,88	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
		5.02.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase Barang Milik Daerah SKPD yang diadakan**	**100**	**%**	**2.101.958.000**	**67**	**%**	**424.370.000**	**80**	**%**	**313.710.773**	**0,00%**	**%**	**0**							**-**	**%**	**-**	**67**	**%**	**424.370.000**	**67,00**	**20,19**	**Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah**
		5.02.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan mesin lainnya	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	132	Unit	996.575.000	6	Unit	424.370.000	10	unit	27.914.000	-	unit	-							-	unit	-	6	unit	424.370.000	4,55	42,58	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
		5.02.01.2.07.0005	Pengadaan mebel	Jumlah unit mebel yang disediakan	345	Unit	1.105.383.000	0	Unit	-	10	unit	285.796.773	-	unit	-							-	unit	-	-	unit	-	0,00	0,00	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
		5.02.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang tersedia**	**90**	**%**	**1.052.092.000**	**127**	**%**	**301.706.770**	**90**	**%**	**727.487.000**	**27,45%**	**%**	**161.442.771**							**27,45**	**%**	**161.442.771**	**154**	**%**	**465.149.541**	**171,61**	**44,21**	**Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah**
		5.02.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat menyurat	Jumlah laporan penyediaan Jasa surat menyurat	9	Laporan	13.097.000	9	Laporan	1.861.000	3	laporan	483.122.000	2	laporan	500.000							2	laporan	500.000	11	laporan	2.361.000	122,22	18,03	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
		5.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	108	Laporan	510.841.000	27	Laporan	148.496.224	36	laporan	4.365.000	9	laporan	47.874.532							9	laporan	47.874.532	36	laporan	196.370.756	33,33	38,44	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
		5.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	36	Laporan	528.154.000	9	Laporan	153.349.546	12	laporan	240.000.000	3	laporan	113.068.239							3	laporan	113.068.239	12	laporan	266.417.785	33,33	50,44	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ SubKegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan (output)	Target RPD pada Tahun 2024-2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)			Realisasi Capaian Kinerja RPD Kabupaten/kota sampai dengan RKPD Kabupaten/Kota Tahun lalu (2024)			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota Tahun Berjalan yang dievaluasi (2025)			Realisasi Kinerja Pada Triwulan									Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Yang Dievaluasi (2025)			Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMDn/d tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)			Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026		Unit Perangkat Daerah Penanggung jawab
													I		II		III		IV											
1	2	3	4	5	6			7			8			9		10		11		12		13			14=7+13			15=14/6		16
					K		Rp	K		Rp	K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K		Rp	K		Rp	K	Rp	
		5.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan Pemerintah Daerah	Persentase BMD pada SKPD yang dipelihara	100	%	1.001.613.000	116	%	146.887.966	84	%	456.946.550	13,13%	%	17.789.425							13,13	%	17.789.425	129	%	164.577.391	129,13	16,44	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
		5.02.01.2.09.0002	Penyediaan jasa pemeliharaan biaya pemeliharaan pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinan	57	Unit	363.391.000	19	Unit	97.368.822	19	unit	132.548.000	5	unit	16.031.925							5	unit	16.031.925	24	unit	113.400.747	42,11	31,21	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
		5.02.01.2.09.0005	Pemeliharaan mebel	Jumlah mebel yang dipelihara	30	Unit	32.417.000	10	Unit	4.020.000	10	unit	10.788.500	-	unit	112.500							-	unit	112.500	10	unit	4.132.500	33,33	12,75	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
		5.02.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan mesin lainnya	Jumlah peralatan dan mesin yang dipelihara	30	Unit	327.462.000	8	Unit	13.295.000	10	unit	107.810.050	-	unit	540.000							-	unit	540.000	8	unit	13.835.000	26,67	4,22	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
		5.02.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi gedung dan bangunan lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	3	Unit	278.343.000	1	Unit	32.204.144	1	unit	205.800.000	0	unit	1.105.000							0	unit	1.105.000	1	unit	33.309.144	41,67	11,97	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
		5.02.02	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Persentase Kepatuhan OPD dalam Penyusunan Dokumen Keuangan Daerah Sesuai Standar	100	%	1.616.660.665.000	85	%	428.882.944.516	100	%	449.305.244.401	8,22%	%	59.996.290.784							8,22	%	59.996.290.784	93	%	488.878.245.300	93,22	30,19	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
		5.02.02.2.01	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN RENCANA ANGGARAN DAERAH	Presentase Dokumen Anggaran Daerah (APBD dan P.APBD) yang disusun tepat waktu	100	%	5.654.101.000	100	%	1.500.375.800	96	%	1.985.040.044	0,91%	%	149.706.215							0,91	%	149.706.215	101	%	1.649.962.015	100,91	29,18	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
		5.02.02.2.01.0001	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah dokumen KUA dan PPAS yang disusun	6	Dokumen	1.334.101.000	2	Dokumen	323.340.019	2	dokumen	444.440.730	-	dokumen	9.286.400							-	dokumen	9.286.400	2	dokumen	332.626.419	33,33	24,93	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
		5.02.02.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah dokumen perubahan KUA dan perubahan PPAS yang disusun	6	Dokumen	1.370.000.000	2	Dokumen	342.114.341	2	dokumen	454.999.866	-	dokumen	-							-	dokumen	-	2	dokumen	342.114.341	33,33	24,97	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
		5.02.02.2.01.0007	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	6	Dokumen	1.405.000.000	2	Dokumen	390.269.117	2	dokumen	470.599.897	2	dokumen	113.320.625							2	dokumen	113.320.625	4	dokumen	503.589.742	66,67	35,84	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
		5.02.02.2.01.0008	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang P.APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran P.APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang P.APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran P.APBD	15	Dokumen	1.545.000.000	6	Dokumen	444.552.323	5	dokumen	514.999.901	-	dokumen	27.099.190							-	dokumen	27.099.190	6	dokumen	471.651.513	40,00	30,53	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
		5.02.02.2.01.0013	Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota								208	orang	99.999.650	-	orang	-							-	orang	-	-	orang	-			
		5.02.02.2.02	KOORDINASI DAN PENGELOLAAN PERBENDAHARAAN DAERAH	Persentase OPD yang mendapatkan pembinaan pengelolaan keuangan daerah	100	%	2.287.385.000	148	%	686.156.278	100	%	762.239.200	10,59%	%	41.034.640							10,59	%	41.034.640	159	%	727.190.918	158,59	31,79	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
		5.02.02.2.02.0001	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	27000	Dokumen	1.094.234.000	9033,708	Dokumen	328.864.862	9000	dokumen	364.697.000	797	dokumen	25.303.690							797	dokumen	25.303.690	9.831	dokumen	354.168.552	36,41	32,37	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
		5.02.02.2.02.0003	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Jumlah Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	624	Dokumen	367.786.000	208	Dokumen	89.632.650	208	dokumen	122.579.000	100	dokumen	9.913.000							100	dokumen	9.913.000	308	dokumen	99.545.650	49,36	27,07	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
		5.02.02.2.02.0005	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan evaluasi Pengelolaan dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Jumlah Dokumen hasil Koordinasi fasilitasi asitensi, sinkronisasi, supervisi monitoring dan evaluasi pengelolaan dana perimbangan dan dana transfer lainnya.	276	Dokumen	236.828.000	169	Dokumen	61.041.941	92	dokumen	78.810.200	24	dokumen	410.000							24	dokumen	410.000	193	dokumen	61.451.941	69,93	25,95	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
		5.02.02.2.02.0006	Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	Terlaksananya Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	3	Dokumen	113.636.000	1	Dokumen	29.407.450	1	dokumen	37.874.000	1	dokumen	-							1	dokumen	-	2	dokumen	29.407.450	66,67	25,88	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
		5.02.02.2.02.0009	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	Jumlah Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	1950	Dokumen	64.986.000	871	Dokumen	60.810.125	650	dokumen	21.659.000	129	dokumen	5.407.950							129	dokumen	5.407.950	1.000	dokumen	66.218.075	51,28	101,90	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

No.	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ SubKegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan (output)	Target RPD pada Tahun 2024-2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)			Realisasi Capaian Kinerja RPD Kabupaten/kota sampai dengan RKPD Kabupaten/Kota Tahun lalu (2024)			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota Tahun berjalan yang dievaluasi (2025)			Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Yang Dievaluasi (2025)			Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMDs/d tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2025)			Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
													I		II		III		IV										
1	2	3	4	5	6			7			8			9		10		11		12		13			14=7+13			15=14/6		16
					K		Rp	K		Rp	K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K		Rp	K		Rp	K	Rp	
		5.02.02.2.02.0010	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	Jumlah Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	15	Dokumen	409.915.000	18	Dokumen	116.399.250	5	dokumen	136.620.000	3	dokumen	-							3	dokumen	-	21	dokumen	116.399.250	140,00	28,40	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
		5.02.02.2.03	**KOORDINASI DAN PELAKSANAAN AKUNTANSI OAN PELAPORAN KEUANGAN DAERAH**	**Presentase Dokumen Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Yang Disusun**	**100**	**%**	**2.528.125.000**	**77**	**%**	**730.622.524**	**100**	**%**	**838.850.000**	**29,59%**	**%**	**87.941.694**							**29,59**	**%**	**87.941.694**	**107**	**%**	**818.564.218**	**106,59**	**32,38**	**Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah**
		5.02.02.2.03.0002	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban	33	Dokumen	254.400.000	11	Dokumen	81.086.500	11	laporan	81.050.000	-	laporan	-						-	laporan	-	11	laporan	81.086.500	33,33	31,87	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
		5.02.02.2.03.0003	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	12	Laporan	288.900.000	4	Laporan	75.373.000	4	laporan	96.300.000	1	laporan	-						1	laporan	-	5	laporan	75.373.000	41,67	26,09	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
		5.02.02.2.03.0005	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	6	Dokumen	1.812.300.000	2	Dokumen	533.226.334	2	dokumen	604.100.000	-	dokumen	87.941.694						-	dokumen	87.941.694	2	dokumen	621.168.028	33,33	34,28	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
		5.02.02.2.03.0006	Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut Terhadap LHPH BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Jumlah Dokumen Tanggapan/Tindak Lanjut Terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	3	Dokumen	33.750.000	1	Dokumen	-			0									-		-	1		-	33,33	0,00	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
		5.02.02.2.03.0007	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	6	Dokumen	33.750.000	2	Dokumen	9.756.900	2	dokumen	22.500.000	-	dokumen	-						-	dokumen	-	2	dokumen	9.756.900	33,33	28,91	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
		5.02.02.2.03.0011	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	450	Orang	105.029.000	150	Orang	31.179.790	150	orang	34.900.000	49	orang	-						49	orang	-	199	orang	31.179.790	44,22	29,69	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
		5.02.02.2.04	**PENUNJANG URUSAN KEWENANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH**	**Terlaksananya penyaluran dana kewenangan pengelolaan keuangan daerah**	**100**	**%**	**1.605.908.968.000**	**25**	**%**	**425.137.131.000**	**80**	**%**	**445.625.039.157**	**0,00%**	**%**	**59.712.299.847**						-	**%**	**59.712.299.847**	**25**	**%**	**484.849.430.847**	**25,00**	**30,19**	**Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah**
		5.02.02.2.04.0008	Analisis perencanaan dan penyaluran bantuan keuangan	Jumlah laporan hasil analisis perencanaan dan penyaluran bantuan keuangan	18	Laporan	1.366.219.462.000	4	Laporan	405.107.175.100	6	laporan	400.220.205.808	-	laporan	59.628.549.847						-	laporan	59.628.549.847	4	laporan	464.735.724.947	22,22	34,02	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
		5.02.02.2.04.0009	Pengelolaan dana darurat dan mendesak	Jumlah laporan hasil pengelolaan dana darurat dan mendesak	12	Laporan	192.893.012.000	3	Laporan	2.014.691.000	4	laporan	19.413.877.949	-	laporan	83.750.000						-	laporan	83.750.000	3	laporan	2.098.441.000	25,00	1,09	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
		5.02.02.2.04.0010	Pengelolaan dana bagi hasil Kabupaten/Kota	Jumlah laporan hasil pengelolaan dana bagi hasil kabupaten/Kota	6	Laporan	46.796.494.000	1	Laporan	18.015.264.900	2	laporan	25.990.555.400	-	laporan	-						-	laporan	-	1	laporan	18.015.264.900	16,67	38,50	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
		5.02.02.2.05	**Pengelolaan data dan implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah lingkup keuangan daerah**	**Persentase OPD yang mendapatkan pembinaan implementasi SIPD**	**100**	**Persen**	**282.282.000**	**75**	**Persen**	**27.858.914**	**80**	**%**	**94.076.000**	**0,00%**	**%**	**5.218.388**						-	**%**	**5.218.388**	**75**	**%**	**33.077.302**	**75,00**	**11,72**	**Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah**
		5.02.02.2.05.0003	Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah bidang keuangan daerah pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah orang yang mengikuti pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	300	orang	282.282.000	134	orang	27.858.914	100	orang	94.076.000	-	orang	5.218.388						-	orang	5.218.388	134	orang	33.077.302	44,67	11,72	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ SubKegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan (output)	Target RPD pada Tahun 2024-2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)			Realisasi Capaian Kinerja RPD Kabupaten/Kota sampai dengan RKPD Kabupaten/Kota Tahun lalu (2024)			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota Tahun Berjalan yang dievaluasi (2025)			Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Yang Dievaluasi (2025)			Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMDs/d tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026)			Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026		Unit Perangkat Daerah Penanggung jawab
													I		II		III		IV										
1	2	3	4	5	6			7			8			9		10		11		12		13			14=7+13			15=14/6		16
					K		Rp	K		Rp	K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K		Rp	K		Rp	K	Rp	
		5.02.03	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Persentase OPD yang menerapkan pengelolaan BMD sesuai standar	100	%	6.675.000.000	100	%	736.648.838	100	%	2.032.550.000	57,99%	% 73.795.561							57,99	%	73.795.561	158	%	810.444.399	157,99	12,14	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
		5.02.03.2.01	PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Terlaksananya penyusunan dokumen pengelolaan barang milik daerah	100	%	6.675.000.000	100	%	736.648.838	100	%	2.032.550.000	57,99%	% 73.795.561							57,99	%	73.795.561	158	%	810.444.399	157,99	12,14	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
		5.02.03.2.01.0001	Penyusunan Standar Harga	Jumlah Standar Harga yang Disusun	156	Dokumen	750.000.000	52	Dokumen	34.722.500	52	dokumen	250.000.000	52	dokumen 11.319.000							52	dokumen	11.319.000	104	dokumen	46.041.500	66,67	6,14	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
		5.02.03.2.01.0003	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	156	Dokumen	150.000.000	52	Dokumen	45.567.000	52	dokumen	50.000.000	-	dokumen -							-	dokumen	-	52	dokumen	45.567.000	33,33	30,38	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
		5.02.03.2.01.0004	Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	3	Dokumen	300.000.000	1	Dokumen	2.081.000	1	dokumen	100.000.000	-	dokumen -							-	dokumen	-	1	dokumen	2.081.000	33,33	0,69	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
		5.02.03.2.01.0005	Penatausahaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	156	Laporan	1.200.000.000	52	Laporan	217.567.862	52	laporan	600.000.000	52	laporan 48.257.195							52	laporan	48.257.195	104	laporan	265.825.057	66,67	22,15	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
		5.02.03.2.01.0006	inventarisasi Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah	52	Laporan	300.000.000	52	Laporan	50.707.725	52	laporan	125.000.000	52	laporan -							52	laporan	-	104	laporan	50.707.725	200,00	16,90	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
		5.02.03.2.01.0007	Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah	12	Laporan	2.400.000.000	4	Laporan	271.598.466	4	laporan	402.550.000	-	laporan 5.455.798							-	laporan	5.455.798	4	laporan	277.054.264	33,33	11,54	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
		5.02.03.2.01.0008	Penilaian Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah	90	Laporan	525.000.000	30	Laporan	58.979.319	30	laporan	155.000.000	-	laporan -							-	laporan	-	30	laporan	58.979.319	33,33	11,23	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
		5.02.03.2.01.0010	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtangaman, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	78	Dokumen	1.050.000.000	26	Dokumen	55.424.966	26	dokumen	350.000.000	-	dokumen 8.763.568							-	dokumen	8.763.568	26	dokumen	64.188.534	33,33	6,11	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
2	Meningkatkankualitas pengelolaankeuangan dan asetdaerah																													Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
3	Meningkatnyakualitas laporankeuangan																													Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
4	Meningkatnyakualitas pengelolaanBarang Milik Daerah																													Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
																								Rata-rata capaian kinerja			65,94	23,10	
																								Predikat			Sangat Rendah	Sangat Rendah	

Catatan

Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja : Faktor Pendorong Program Pengelolaan Keuangan Daerah adanya ketentuan yang menjadi acuan dalam memberikan pelayanan SP2D dan lainnya kepada OPD sehingga pelayanan tepat waktu.

Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja : Pada Program Pengelolaan Keuangan Daerah, OPD belum melengkapi permohonanan sesuai ketentuan sehingga pelayanan SP2D dan lainnya tidak dapat segera ditindaklanjuti

Tindak Lanjut yang Diperlukan Dalam Triwulan Berikutnya : Menghimbau OPD untuk melakukan penelitian dokumen secara mandiri sebelum mengajukan permohonan SP2D dan lainnya.

Tindak Lanjut yang Diperlukan Dalam RKPD Tahun Berikutnya : Menjadikan hasil evaluasi kinerja tahun 2024 sebagai pedoman di tahun 2025

Kolom 13 Penjumlahan kolom 9+10+11+12 untuk kinerja ada yang tidak diakumulasi

Disusun
Nganjuk, 20 Maret 2025
Plt. Kepala BPKAD
Kabupaten Nganjuk

Dra. Dyah Puspita Rini, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19680511 199202 2 001

Dievaluasi
Nganjuk, Maret 2025
Kepala BAPPEDA
Kabupaten Nganjuk

Drs. Adam Muharto, A.P., M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19730511 199311 1 002